

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA BANTUAN DAN
PEMBIAYAAN INVESTASI TERHADAP *FINANCIAL RETURN*
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana**



**LIDIA WENNY
1117 29621**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA BANTUAN DAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERHADAP *FINNACIAL RETURN* PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

LIDIA WENNY

No Induk Mahasiswa: 111729621

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 28 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Bambang Suropto, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Tri Ciptaningsih, SE., M.M, Ak.

Yogyakarta, 28 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LIDIA WENNY

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA

Jalan Seturan Yogyakarta 55281

e-mail: wennylidia21@gmail.com

ABSTRAK

This research aims to analyze the impact of capital expenditure, assistance expenditure and investment financing on financial return in Local government of Indonesia. Financial return is expected to be reaped by the local government for spending made within 1 year. This research examines the efforts of local government spending to generate financial returns in the form of local revenue in the next period. The population in this research are local government in Indonesia, data obtained from local government financial reports in 2018 and Local Own-Source Revenue in 2019. The research sample amounted to 100 local governments with 512 population of local governments in Indonesia. Data was obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) through the website djpk.kemenkeu.go.id. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results of the research showed that capital expenditure and investment financing have a positive effect on financial return meanwhile Assistance expenditure have a negative effect on financial return in local government.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keywords: belanja modal, belanja bantuan, pembiayaan investasi, financial return pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan tujuan utama aktivitas ekonomi baik privat maupun publik. Bagi individu, kesejahteraan diukur dengan kemampuan memenuhi kebutuhan melalui pendapatan yang diperoleh. Sedangkan di sektor publik, kesejahteraan diukur melalui pertumbuhan ekonomi (pendapatan per kapita) di masyarakat. Hal ini mengasusikan setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdaya sesuai kebutuhannya (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2008). Dengan kata lain, pendapatan per kapita menjelaskan tentang sumberdaya ekonomi yang dihasilkan dan dimiliki oleh masyarakat secara rata-rata. Pembangunan ekonomi menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan, melalui distribusi pendapatan dan alokasi yang berkeadilan (Kuncoro, 2010). Fungsi ekonomi publik ini dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme fiskal berupa anggaran pendapatan dan belanja.

Kebijakan publik mengupayakan distribusi pendapatan yang merata melalui mekanisme pajak. Pajak dikenakan kepada objek dan wajib pajak dengan akumulasi modal tertentu dan berikutnya disalurkan melalui kebijakan fiskal kepada masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, dana publik dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan kepada berbagai lini barang publik dan layanan publik sesuai target dan tujuan pembangunan. Kebijakan publik merupakan ciri dari model ekonomi campuran yaitu sektor privat dan pemerintah bersama mengambil peran (Stiglitz, 2000). Pemerintah menerapkan beberapa regulasi seperti regulasi bisnis, perpajakan, dan subsidi. Kebijakan publik mengedepankan adanya keadilan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi melalui distribusi pajak dan subsidi.

Pemerintah juga berperan menciptakan iklim bisnis yang kondusif melalui regulasi, birokrasi, dan perijinan. Kondusivitas ini berkenaan dengan menciptakan kondisi politik dan sosial

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang stabil sehingga aktivitas ekonomi berjalan baik. Ketiga, peran pemerintah untuk menyediakan barang publik yang tidak bisa diproduksi oleh sektor privat, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Terakhir melalui keuangan publik, pemerintah melakukan jaminan sosial bagi kalangan masyarakat tertentu. Jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan layanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat yang belum mampu memenuhinya.

PAD merupakan indikator kemandirian keuangan pemerintah daerah (Hibzon, 2007). Hal ini berarti semakin tinggi PAD maka kemandirian pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah PAD maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah hanya bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat dan hibah. Upaya peningkatan PAD ditempuh oleh banyak pemerintah daerah dengan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah (Priyono, 2013). Hal ini diharapkan mampu mendorong perkembangan PAD menjadi lebih baik.

Pengembalian keuangan (*financial return*) di sektor publik merupakan pengembalian keuangan atas investasi publik yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan pemerintah daerah (Misch & Wolff, 2008). Tujuan *financial return* adalah untuk keberlanjutan keuangan (Adam & Bevan, 2014). Dalam artian, aktivitas keuangan pemerintah daerah menghasilkan *financial return* untuk dapat meningkatkan kapasitas keuangan (APBD) pada periode selanjutnya. Secara siklikal, peningkatan APBD ini akan mendorong pengembalian pada periode berikutnya. Aktivitas keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh *financial return* dibagi menjadi 2 yaitu melalui aktivitas bisnis dan investasi barang publik (Misch & Wolff, 2008). Aktivitas bisnis seperti penyertaan modal dan BUMD dapat menghasilkan profit. Di lain sisi, investasi infrastruktur dan aset pemerintah daerah akan menghasilkan pajak dan retribusi daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI

Teori Anggaran Pemerintah

Anggaran ialah suatu rencana yang berisi serangkaian kegiatan yang dijelaskan dengan unit (satuan) moneter yang akan dilakukan dalam satu periode waktu tertentu (Mulyadi, 2001). Di sektor pemerintah, anggaran dimaknai sebagai rencana pendapatan dan belanja yang memuat seluruh aktivitas pelayanan terhadap publik selama satu periode mendatang (Lindbeck, 2003). Pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja (APB) dalam setiap level sesuai dengan konsep dan praktik kenegaraan. Di Indonesia, setiap level pemerintah menyusun APB mulai dari level pusat yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan instrumen keuangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka mengarahkan pembangunan sosial dan ekonomi, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran menjadi instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah sehingga layanan masyarakat dan pembangunan dapat dilaksanakan.

Teori Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan pemerintah daerah adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan pemerintah daerah digolongkan menjadi beberapa kelompok di antaranya (Kementerian Keuangan RI, 2012) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan lain-lain ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber lain milik pemerintah daerah yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanja Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2012 tentang klasifikasi anggaran, belanja pemerintah daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut penggunaannya, belanja pemerintah daerah dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah kegiatan pengeluaran belanja yang berhubungan langsung dengan program kerja pemerintah daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2007). Sedangkan belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak berhubungan langsung dengan program kerja pemerintah daerah.

Pembiayaan Pemerintah Daerah

Pembiayaan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mekanisme surplus dan defisit keuangan (Kementerian Dalam Negeri, 2007). Pemerintah daerah menutup defisit dengan mekanisme utang atau penerbitan obligasi. Sedangkan surplus anggaran dikelola dengan menginvestasikan dalam penyertaan modal baik kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik daerah (BUMD) (Putera, 2016). Dengan kata lain, pembiayaan pemerintah daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk mengelola selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Teori Tujuan Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah terbagi menjadi berbagai pos pengeluaran sesuai dengan kegunaan dan kepentingannya. Banyaknya pos pengeluaran tersebut hanya memiliki beberapa tujuan. Pada umumnya, belanja pemerintah bertujuan pada pelayanan dasar minimum, pemenuhan kebutuhan barang publik, dan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Reksohadiprodjo, 1996). Belanja pemerintah melalui fungsinya terbagi ke berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tergabung dalam unit dinas, badan, maupun kantor urusan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Mukiwihando, 2020). SKPD ini menjalankan operasional sesuai bidang dengan pendanaan dari anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya.

Paling utama, belanja pemerintah bertujuan untuk memenuhi layanan dasar minimum yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan pangan layak (Kahang, Saleh, & Suharto, 2016). Melalui belanja pemerintah, berbagai infrastruktur sekolah dan sarana penunjang lainnya dibangun dan disediakan untuk memberikan akses sebesar-besarnya bagi anak usia sekolah. Di bidang kesehatan, belanja pemerintah diwujudkan dalam program kesehatan anak dan ibu (posyandu), puskesmas, dan pengobatan gratis generik (Kahang, Saleh, & Suharto, 2016). Sedangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah melakukan kebijakan bantuan pangan, subsidi pertanian, dan sebagainya.

Tujuan belanja pemerintah lainnya adalah pemenuhan barang publik yang tidak dapat diproduksi oleh swasta (Luter, Indrocahyo, & Resti, 2019). Barang publik merupakan barang penting yang mendukung dan menunjang aktivitas masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, irigasi, dan sebagainya. Melalui belanja modal, pemerintah melakukan pengadaan barang publik yang bertujuan untuk memperlancar aktivitas ekonomi, mobilitas manusia, interaksi sosial, dan akses pelayanan publik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Todaro & Smith, 2009).

Tujuan belanja pemerintah yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Lantu, Koleangan, & Rotinsulu, 2017).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selain bertujuan pelayanan masyarakat, belanja pemerintah daerah juga bertujuan menghasilkan *financial return* agar pendapatan daerah meningkat. Peningkatan pendapatan daerah ini yang menjadi kapasitas keuangan dalam melakukan belanja di periode berikutnya

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan investasi terhadap *financial return*. Pengukuran dilakukan atas dasar jangka waktu berselisih 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa investasi pemerintah akan menghasilkan dividen dan bagi hasil dalam 1 tahun (Haryanto & Nugraha, 2016). Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan pajak dan retribusi daerah dalam 1 tahun (Luter, Indrocahyo, & Resti, 2019)

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk menambah atau meningkatkan aset tetap seperti infrastruktur dan gedung (Cnossen & Sinn, 2003). Belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi (Luter, Indrocahyo, & Resti, 2019). Pada tahun berikutnya, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi ini akan meningkatkan PAD berupa pajak dan retribusi daerah. Penelitian sebelumnya tidak spesifik pada belanja modal, akan tetapi secara umum pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PAD (Hibzon, 2007). Berdasar argumen tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap *financial return*

Belanja bantuan keuangan merupakan pengeluaran pemerintah yang bertujuan membantu pemerintah lain di berbagai level (Ritonga, 2014). Oleh karena itu, belanja bantuan keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendanaan kebijakan pemerintah daerah lain meningkat (Sitaniapessy, 2013). Pertumbuhan ekonomi ini kemudian akan meningkatkan retribusi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah (parkir, wisata, dan sebagainya) dan pajak daerah (hotel, restoran, dan sebagainya). Penelitian sebelumnya tidak spesifik pada belanja bantuan keuangan, akan tetapi secara umum pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PAD (Hibzon, 2007). Berdasar argument tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 2: Belanja bantuan keuangan berpengaruh positif terhadap *financial return*

Investasi pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk memanfaatkan asetnya (Ritonga, 2014). Pembiayaan investasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah di sektor swasta yang dinilai layak baik melalui pendirian BUMD maupun penyertaan modal melalui saham perusahaan swasta. Secara rinci, investasi pemerintah daerah di sektor swasta dapat berupa penyertaan saham, pendirian badan usaha, dan kerjasama usaha lainnya. Pembiayaan investasi pemerintah daerah secara langsung meningkatkan pendapatan, meskipun perolehan dividen dan bagi hasil paling cepat 1 tahun setelah investasi (Haryanto & Nugraha, 2016). Perolehan dividen, bunga, maupun bagi hasil akan meningkatkan penerimaan PAD, sehingga pembiayaan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap PAD periode berikutnya. Berdasar argumen tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 3: Pembiayaan investasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *financial return*

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu meneliti hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Collis & Hussey, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan hasil perhitungan kuantitatif sehingga penjelasan terkait hasil dapat diuraikan. Tujuan penelitian kuantitatif deskriptif adalah membuat analisis hubungan, deskripsi,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat dari berbagai fenomena yang diselidiki (Purnomo, 2016). Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara belanja pemerintah daerah suatu periode terhadap *financial return* berupa PAD pada periode berikutnya. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui situs website djpk.kemenkeu.go.id dan laman www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2021. Data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah di DJPK diolah dengan metode statistik kuantitatif untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel data 100 pemerintah daerah dengan populasi 512 pemerintah daerah di Indonesia. 100 sampel merupakan jumlah yang ideal karena telah melebihi 10 persen dari total populasi (Purnomo, 2016). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *random sampling* (pengacakan) menggunakan rumus $Randbetween(1; 512)$ pada aplikasi Microsoft Excel. Angka-angka yang teracak menunjukkan kode yang telah disematkan pada setiap nama kabupaten/kota di Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi 100 pemerintah daerah dalam kurun waktu yang sama yaitu 2018. Data dengan individu dalam satu periode waktu disebut data *cross section* (Collis & Hussey, 2014). Data sekunder dikumpulkan berdasarkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs website www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd. Berikutnya, penulis mengumpulkan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain belanja dan pembiayaan tahun 2018 dan PAD tahun 2019.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Data *cross section* dari laporan realisasi anggaran (APBD) kabupaten/kota direkapitulasi untuk diolah secara statistik menggunakan IBM SPSS 24. Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Variabel	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
Dependen (Y)	<i>Financial return</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
Independen (X)	Belanja Modal	Belanja Modal Pemerintah Daerah	Nilai realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018
	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018
	Pembiayaan Investasi Pemerintah Daerah	Pembiayaan Investasi Pemerintah Daerah	Nilai realisasi Pembiayaan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018

Metode dan Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena jumlah variabel independen yang lebih dari satu. Regresi linier berganda menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui hubungan linier antar variabel secara rata-rata (Gujarati & Porter, 2013). Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, data yang akan dianalisis harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Pada uji normalitas digunakan metode 16 Kolmogorov-Smirnov. Data penelitian dikatakan normal jika memperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari alpha sebesar 0,05. Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi di antara variabel independen. Model regresi dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas apabila angka tolerance value lebih besar dari 0,01 dan angka Variance Inflation Factors (VIF)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lebih kecil dari 10. Metode yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas yaitu uji glejser dan grafik scatterplot. Uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson (DW).

Setelah lolos uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan meregresikan variabel independen belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan investasi Pemda terhadap variabel dependen *financial return*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Purnomo, 2016). Perbedaan dengan regresi linier sederhana adalah, bahwa regresi linier sederhana hanya menggunakan satu variabel independen dalam satu model regresi, sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi (Purnomo, 2016). Persamaan model regresi linier berganda dengan data *cross section* (Purnomo, 2016) adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X1_i + \beta_2 X2_i + \dots + \beta_k XK_i + e$$

Adapun persamaan model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$FR_i = \alpha + \beta_1 BM_i + \beta_2 BK_i + \beta_3 PI_i + e$$

Uji regresi linier berganda terdiri atas uji signifikansi simultan (Uji F), uji koefisien determasi (R^2) dan Uji Signifikansi Parsial (Uji T). Pada uji F menggunakan dasar penyimpulan yaitu tingkat signifikansi sebesar kurang dari 5% atau $\leq 0,05$. Koefisien determinasi (R^2) adalah analisis untuk mengetahui besaran pengaruh variabel independen yang secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (*R-square*) biasanya bernilai antara nol hingga satu. Pada uji signifikansi parsial (uji T) Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95.

Statistik Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan investasi suatu tahun terhadap *financial return* berupa PAD pada tahun berikutnya. Data yang digunakan adalah PAD tahun 2019, belanja modal tahun 2018, belanja bantuan keuangan tahun 2018, dan pembiaaan investasi tahun 2018. Analisis deskriptif menjelaskan secara umum data penelitian yang diestimasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Minimum (Rp. juta)	Maximum (Rp. juta)	Mean (Rp. juta)	Std. Deviation
PAD	100	3.324	2.548.258	206.066	376924791438
Belanja Modal	100	80.247	1.049.696	292.102	175176891551
Belanja Bantuan Keuangan	100	503	601.737	180.189	129502159061
Pembiayaan Investasi	100	500	193.554	8.585	22447397074

Tabel menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan realisasi anggaran pendapatan yang diterima pemerintah daerah dalam satu periode yang bersumber dari pajak dan retribusi dari wilayah itu sendiri sesuai undang-undang. Data PAD memiliki nilai minimum 3,324 miliar sedangkan maksimumnya senilai 2,548 triliun. Hal ini menandakan adanya data yang bervariasi dari pengacakan sampel, bahwa daerah yang memiliki kapasitas keuangan tinggi dan rendah tersebar cukup merata. Variasi hasil pengacakan dari pemerintah daerah dengan kapasitas keuangan tinggi terlihat pada nilai maksimum PAD sebesar 2,548 triliun sedangkan pemerintah daerah dengan kapasitas keuangan rendah memiliki PAD 3,324 miliar. Pada nilai rata-rata sebesar 206 miliar yang berarti bahwa nilai rata-rata mendekati kepada nilai minimum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah secara rata-rata mampu memperoleh 206 miliar per tahun pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi asli dari wilayah itu sendiri.

Belanja modal merupakan realisasi anggaran pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menambah atau membeli aset tetap pemerintah daerah. Pada Tabel 4.1 menunjukkan pemerintah daerah mengeluarkan belanja modal paling minimum 80,247 miliar dengan paling maksimum 1,049 triliun. Hal

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas keuangan yang merata antar daerah yang diambil sebagai sampel. Nilai rata-rata belanja modal pemerintah daerah sebesar 292,1 miliar sehingga mendekati kepada nilai minimum. Oleh karena itu dapat disimpulkan, pemerintah daerah melakukan penambahan atau pembelian aset tetap daerah rata-rata 292,1 miliar per tahun.

Belanja bantuan keuangan merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dana kepada pemerintah desa, pemerintah lain yang setara, atau pemerintah provinsi dalam satu periode. Data sampel yang dikumpulkan menunjukkan belanja bantuan keuangan pemerintah daerah paling minimum sebesar 503 juta dan maksimum 601 miliar. Secara rata-rata, pemerintah daerah mengeluarkan belanja bantuan keuangan senilai 180,189 miliar. Dengan persebaran yang merata ini, sampel penelitian menunjukkan pemerintah daerah memiliki kapasitas keuangan yang berbeda dalam hal belanja bantuan keuangan. Hal ini dilihat dari belanja bantuan keuangan yang memiliki rentang besar antara nilai minimum dan maksimum.

Pada bagian pembiayaan investasi, setiap daerah memiliki preferensi yang berbeda tentang mengalokasikan anggaran untuk investasi di sektor swasta. Hal ini terlihat dari nilai anggaran pembiayaan investasi pemerintah daerah yang bervariasi sehingga diketahui pemerintah daerah memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam mengelola keuangan pemerintah yang diinvestasikan ke sektor swasta. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah telah memiliki keinginan investasi di sektor swasta minimal senilai 500 juta. Sedangkan pemerintah daerah dengan kapasitas keuangan yang besar memiliki pembiayaan investasi hingga 193,554 miliar dengan rata-rata nilai pembiayaan seluruh sampel sebesar 8,585 miliar. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai memahami konsep investasi di sektor swasta untuk pengelolaan aset daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Uji	Dasar Kesimpulan	Hasil Estimasi	Kesimpulan
Uji Normalitas Metode <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	Sig. > 0,05	Sig. 0,066	Lolos Uji

Hasil estimasi data menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig. 0,066 sehingga > 0,05 sebagai standar penyimpulan uji normalitas. Oleh karena itu, data penelitian ini disimpulkan berdistribusi normal atau lolos uji normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Dasar Penyimpulan		Collinearity Statistics		Hasil
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	
Belanja Modal	>0,05	<10	0,631	1,586	Lolos Uji
Belanja Bantuan Keuangan	>0,05	<10	0,922	1,085	Lolos Uji
Pembiayaan Investasi	>0,05	<10	0,638	1,567	Lolos Uji

Nilai *tolerance* pada variabel belanja modal 0,631, belanja bantuan keuangan 0,922 dan pembiayaan investasi 0,638 sehingga ketiganya memiliki *tolerance* > 0,05. Nilai VIF variabel belanja modal 1,586, belanja bantuan keuangan 1,085, dan pembiayaan investasi 1,567 sehingga memenuhi standar < 10. Oleh karena itu, ketiga variabel independen tersebut lolos uji multikolinearitas atau tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Dasar Penyimpulan Sig. Spearman's rho	Sig. Pearson Correlation Residual	Hasil
Belanja Modal	> 0,05	1,000	Lolos Uji
Belanja Bantuan Keuangan	> 0,05	1,000	Lolos Uji
Pembiayaan Investasi	> 0,05	1,000	Lolos Uji

Hasil estimasi SPSS (Tabel 4.4) menunjukkan nilai sig. ketiga variabel sebesar 1,000 sehingga telah melebihi dasar penyimpulan 0,05. Dengan demikian, data penelitian ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas secara keseluruhan pada variabel independen.

4. Uji Autokorelasi

DW Tabel ($DU < DW < 4 - DU$)	Durbin-Watson	Hasil
1,736 s.d 2,264	2,020	Lolos Uji

Nilai DU pada cell 100 ; 3 (N ; k) sebesar 1,736 sedangkan nilai 4 – DU sebesar 4 – 1,736 yaitu 2,264. Maka, data dinyatakan lolos uji autokorelasi jika nilai estimasi DW terletak di antara 1,736 ; 2,264 ($1,736 < DW < 2,264$). Nilai estimasi DW adalah 2,020 maka nilai DW terletak di antara DU dengan 4 – DU ($1,736 < 2,020 < 2,264$). Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan lolos uji autokorelasi atau tidak memiliki masalah autokorelasi.

5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dasar Penyimpulan		Hasil Estimasi SPSS		Kesimpulan
F Tabel (96 ; 3)	Sig.ANOVA	F Hitung	Sig. ANOVA	
2,700	<0,05	126,066	0,000	Berpengaruh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel menunjukkan bahwa dasar penyimpulan nilai F tabel sebesar 2,700 dan sig. 0,05. Hasil estimasi SPSS diperoleh nilai F hitung 126,066 dan sig. 0,000. Nilai sig. 0,000 ($< 0,05$) dan F hitung 126,066 ($> 2,700$ F tabel). Karena telah memenuhi dasar penyimpulan, maka uji ini menyimpulkan bahwa variabel independen belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan investasi berpengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen *financial return*.

6. Uji Signifikansi Determinan (Uji R-square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
Summary	0,893 ^a	0,798	0,791

Uji signifikansi determinan menganalisis nilai R-square pada hasil estimasi model Summary dari SPSS. Nilai R-square menunjukkan persentase pengaruh kombinasi variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Penelitian ini memiliki nilai R-square sebesar 0,798 yang berarti kombinasi variabel independen berpengaruh 79,8 persen terhadap variasi variabel dependen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 79,8% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel yang dimasukkan ke dalam penelitian dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

7. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel Independen	Dasar Penyimpulan		Estimasi SPSS		Kesimpulan
	T Tabel (df2 ; $\alpha/2$) (96 ; 0,025)	Sig.	T Hitung	Sig.	
Belanja Modal	>1,988	<0,05	8,240	0,000	Berpengaruh Signifikan
Belanja Bantuan Keuangan	>1,988	<0,05	2,939	0,004	Berpengaruh Signifikan
Pembiayaan Investasi	>1,988	<0,05	9,076	0,000	Berpengaruh Signifikan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap *financial return*. Hal ini dibuktikan dari dua dasar penyimpulan yaitu T hitung 8,240 lebih dari T tabel 1,988. Di samping itu, nilai sig. variabel belanja modal sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 (0,05). Dengan demikian, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap *financial return*.

Belanja bantuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap *financial return*. Hal ini dibuktikan dari dua dasar penyimpulan yaitu T hitung 2,939 lebih dari T tabel 1,988. Di samping itu, nilai sig. variabel belanja bantuan keuangan sebesar 0,004 yang berarti kurang dari 0,05 (0,05). Dengan demikian, belanja bantuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap *financial return*.

Pembiayaan investasi berpengaruh signifikan terhadap *financial return*. Hal ini dibuktikan dari dua dasar penyimpulan yaitu T hitung 9,076 lebih dari T tabel 1,988. Di samping itu, nilai sig. variabel pembiayaan investasi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 (0,05). Dengan demikian, pembiayaan investasi berpengaruh signifikan terhadap *financial return*.

8. Uji Hipotesis

Variabel Independen	Dasar Penyimpulan		Estimasi SPSS		Hasil	Kesimpulan Uji Hipotesis
	Koefisien Beta	Sig.	Koefisien Beta	Sig.		
Belanja Modal	Positif	<0,05	1,025	0,000	Positif Signifikan	H1 Diterima
Belanja Bantuan Keuangan	Positif	<0,05	-0,409	0,004	Negatif Signifikan	H2 Ditolak
Pembiayaan Investasi	Positif	<0,05	8,762	0,000	Positif Signifikan	H3 Diterima

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis 1 Diterima, variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*. Hal ini dibuktikan dari nilai sig. 0,000 ($<0,05$) dan nilai koefisien *betha* 1,025 (positif). Oleh karena itu, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*. Koefisien belanja modal 1,025 berarti setiap kenaikan 1 unit belanja modal akan meningkatkan 1,025 unit *financial return*. Dengan satuan moneter, setiap kenaikan 1 juta anggaran belanja modal akan meningkatkan 1,025 juta *financial return*.

Hipotesis 2 Ditolak, variabel belanja bantuan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial return*. Hal ini dibuktikan dari nilai sig. 0,004 ($<0,05$) dan nilai koefisien *betha* -0,409 (negatif). Hipotesis 2 di awal menduga bahwa variabel belanja bantuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*. Akan tetapi, karena uji hipotesis menyimpulkan bahwa belanja bantuan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial return* maka Hipotesis 2 Ditolak. Koefisien belanja bantuan keuangan -0,409 berarti setiap kenaikan 1 unit belanja bantuan keuangan akan menurunkan 0,409 unit *financial return*. Dengan satuan moneter, setiap kenaikan 1 juta anggaran belanja bantuan keuangan akan menurunkan 0,409 juta *financial return*.

Hipotesis 3 Diterima, variabel pembiayaan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*. Hal ini dibuktikan dari nilai sig. 0,000 ($<0,05$) dan nilai koefisien *betha* 8,762 (positif). Oleh karena itu, pembiayaan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*. Koefisien pembiayaan investasi 8,762 berarti setiap kenaikan 1 unit pembiayaan investasi akan meningkatkan 8,762 unit *financial return*. Dengan satuan moneter, setiap kenaikan 1 juta anggaran pembiayaan investasi akan meningkatkan 8,762 juta *financial return*.

Kesimpulan

Variabel belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *financial return*. Hal ini dibuktikan oleh nilai sig. F dan F hitung $>$ F tabel. Berdasar analisis R-square, diperoleh hasil bahwa kombinasi variabel belanja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

modal, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan investasi berpengaruh 78,9 persen terhadap *financial return*.

Variabel belanja modal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*, sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini menguatkan bahwa belanja infrastruktur dan penambahan aset meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Variabel belanja bantuan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial return*. Hal ini menjadikan hipotesis 2 ditolak, karena semula belanja bantuan keuangan diduga berpengaruh positif signifikan. Pengaruh negatif belanja bantuan keuangan terjadi karena anggaran yang diserahkan kepada penerima tidak dapat dikontrol penggunaannya (Buana, Saragih, & Aritonang, 2018). Hal ini yang menyebabkan pengaruh negatif dari belanja bantuan keuangan karena anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan *financial return*, tetapi sebaliknya anggaran teralokasi pada belanja bantuan keuangan.

Variabel pembiayaan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya manajemen aset dan anggaran pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran yang tidak terpakai agar kapasitas keuangan pemerintah dapat meningkat. Pembiayaan investasi menjadi sumber PAD pemerintah daerah karena secara langsung menghasilkan dividen atas investasi swasta yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Keterbatasan dan Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a) Mengkaji pengaruh ketiga variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap *financial return* pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini tidak mampu mengungkap sebab belanja bantuan keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial return* pemerintah daerah.
- b) Nilai R-square 0,789 sehingga variabel belanja modal, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan investasi berpengaruh 78,9 persen terhadap *financial return* pemerintah daerah. Penelitian ini terbatas tidak mampu menjelaskan 21,1 persen variabel lain yang mempengaruhi *financial return* pemerintah daerah.

Dari keterbatasan penelitian tersebut diatas, peneliti memberikan beberapa saran kepada peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian dengan tema serupa, antara lain:

- a) Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode campuran, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan untuk menggali informasi alasan belanja bantuan keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial return* pemerintah daerah.
- b) Penelitian berikutnya dapat memodifikasi variabel yang ada di penelitian ini. Variabel belanja bantuan keuangan dapat diganti dengan pengeluaran pemerintah daerah lainnya. Pengeluaran ini sesuai peruntukkannya seperti belanja pegawai, belanja subsidi, dan lain sebagainya, atau bentuk pengeluaran sektoral seperti belanja di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya sesuai dinas dan kantor pemerintah.

Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk pemerintah daerah yaitu:

- a) Peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan dan meneliti lebih dalam mengenai *financial return* di sektor pemerintah. Hal ini terutama untuk menjawab temuan alasan variabel belanja bantuan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial return* pemerintah daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b) Pemerintah daerah harus mengelola belanja bantuan keuangan secara hati-hati. Karena variabel ini terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial return*, maka pengelolaannya perlu dievaluasi.
- c) Pemerintah daerah perlu mengembangkan pengelolaan belanja modal karena terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *financial return*. Pemerintah daerah dapat mengelola belanja modal untuk melakukan layanan masyarakat lebih maksimal di samping itu juga mendapatkan *financial return*.
- d) Pemerintah daerah dapat menjadikan pembiayaan investasi sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pembiayaan investasi berpengaruh signifikan terhadap *financial return*. Pembiayaan investasi juga dapat menjadi alternatif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran dan aset pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C., & Bevan, D. (2014). Public Investment, Public Finance, and Growth: The Impact of Distortionary Taxation, Recurrent Cost, and Incomplete Appropriability. *IMF Working Paper*, WP/14/73.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Buana, A. L., Saragih, H. J., & Aritonang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 4 Nomor 2.
- Cnossen, S., & Sinn, H.-W. (2003). *Public Finance and Public Policy in The New Century*. New York: Massachusetts Institute of Technology.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Collis, J., & Hussey, R. (2014). *Business Research: A Practical Guide fo Undergraduate & Postgraduate Student*. London: Sffron House.
- Dirjen Perimbangan Keuangan;. (2021, March 30). *Data APBD dan Realisasi*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2008). *Makroekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Haryanto, R., & Nugraha, H. (2016). Analisis Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Kota Bandung Tahun 2008-2015). *Journal Coopetition*, Vol VII Nomor 2 Halaman 123-126.
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 5 No. 2 Hal. 106-116.
- Ifa, K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Global*, Vol. 2 No. 1.
- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Volume 18 Nomor 2 .
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2012). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lantu, Y. S., Koleangan, R. A., & Rotinsulu , T. O. (2017). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 18 No 5.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Lindbeck, A. (2003). Changing Tides for The Welfare State: An Essay. In S. Cnossen, & H.-W. Sinn, *Public Finance and Public Policy in The New Century* (pp. 3-48). Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
- Luter, M., Indrocahyo, I., & Resti, I. L. (2019). Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 17 Nomor 2 Hal. 38-48.
- Misch, F., & Wolff, P. (2008). The Return on Public Investment: Concept, Evidence and Policy Challenge. *Discussion Paper/Deutsches Institut Fur Entwicklungspolitik*, 25/2008 ISBN 978-3-88985-450-6.
- Mukiwihando, R. (2020). Pengaruh Tata Kelola Terhadap Pencapaian Tujuan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 2 No. 1 Hal 114-123.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pradana, C. W., Sudrajat, M. A., & Amah, N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah serta Kemungkinan Terjadinya Flypaper Effect di Karesidenan Madiun. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 234-246.
- Priyono, N. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode 2001-2010). *Jurnal Universitas Tidar*, Vol. 13 No. 03 Hal. 22-35.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: Wade Group.
- Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Sociohumaniora*, Volume 10 No. 3 hal. 261-269.
- Putra, D. R., & Rahmanti, W. (2013). Return dan Risiko Saham pada Perusahaan Perata Laba dan Bukan Perata Laba. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 pp. 55-66.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2016). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3 No. 1 Hal. 111-117.
- Reksohadiprodjo, S. (1996). Keuangan Negara (Ekonomi Publik): Teori dan Praktik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Volume 1 Nomor 1.
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Penerbit Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Robert, A., & Govindarajan, V. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 1*, 57-67.

Sitaniapessy, H. A. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, Volume 9 Nomor 1.

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of The Public Sector*. New York: W.W. Norton and Company Inc.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Pembangunan Ekonomi Jilid I (Edisi 11)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Uluwiyah, A. (2018). Pengaruh Besaran Anggaran Belanja Pemerintah dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Vol 17 No 4 Hal 309-318.

Zafra-Gomez, J. L., Lopez-Hernandez, A. M., & Hernandez-Bastida, A. (2009). Evaluating Financial Performance in Local Government: Maximizing the Benchmarking Value. *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 5 (1), pg. 151-167.